

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak asasi manusia adalah berbagai macam hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Hak tersebut dimiliki oleh manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan karena berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Setiap orang yang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia akan tetap mendapatkan hak tersebut dan hak tersebut akan terus melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>1</sup> Negara, pemerintah, atau organisasi apapun memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia kepada setiap manusia. Hak asasi manusia harus selalu menjadi tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kewajiban untuk menghormati HAM tersebut berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran serta dapat menikmati kebebasan dalam hak sipil dan politik.

Majelis Umum PBB pada tahun 1973 meminta kepada Komisi HAM PBB untuk membuat suatu konvenan tentang hak sipil dan politik yang

---

<sup>1</sup> Jack Donnelly, dikutip dari Rhona K.M Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hlm. 11.

memuat ketentuan-ketentuan bahwa semua rakyat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Komisi HAM PBB berhasil merancang konvenan tersebut dengan persetujuan Majelis Umum PBB pada tahun 1951 dan pengesahannya dilakukan pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976. Dalam Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* tersebut memaparkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di bidang politik yang menjadikan pasal tersebut sebagai dasar atas hak partisipasi politik.<sup>2</sup>

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) memaparkan bahwa pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria, dan menyatakan agar dapat mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Deklarasi tersebut bersifat tidak mengikat sehingga Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.<sup>3</sup> Undang-Undang ini dibuat sebagai bentuk kepatuhan bangsa Indonesia

---

<sup>2</sup> Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

<sup>3</sup> Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

kepada nilai-nilai global yang baru yang disepakati oleh para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>4</sup>

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* tersebut dibuat dengan latar belakang bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk menjadi batu landasan tatanan dunia baru. Preamble Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan bahwa rakyat PBB bersepakat bahwa mereka akan melakukan kesetaraan pada hak laki-laki dan perempuan. Perubahan peran tradisional pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dibutuhkan agar tercapainya kesetaraan penuh pada laki-laki dan perempuan. Kebanyakan instrumen menyebutkan bahwa adanya larangan diskriminasi berdasarkan gender atau mengandung ketentuan nondiskriminasi yang bertujuan agar perempuan mendapatkan hak atas semua hak dan kebebasannya, namun yang terjadi adalah masih ada diskriminasi yang timbul di dalam masyarakat, sehingga diperlukan adanya instrumen yang dapat memastikan bahwa perempuan dapat menikmati segala haknya tanpa ada diskriminasi.<sup>5</sup>

Diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat menjadi dasar atas diterimanya sebuah deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini memiliki tujuan yang berfokus pada pencapaian kesetaraan antara jenis kelamin sebagai pamanjuan piagam PBB dan mencatat bahwa meskipun adanya Piagam PBB, DUHAM, dan Konvenan-konvenan internasional baru, masih banyak terjadi

---

<sup>4</sup> Riant Nugroho, 2008, *Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 234.

<sup>5</sup> Rhona K.M Smith, dkk., *op. cit.*, hlm. 147.

diskriminasi perempuan.<sup>6</sup> Deklarasi tersebut memiliki kemajuan dengan adanya konvensi yang diterima dan disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember tahun 1979,<sup>7</sup> karena ketentuan konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.<sup>8</sup>

Indonesia memberikan persetujuan sebagai sebuah perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, karena isi Konvensi tersebut sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan dalam Konvensi tersebut tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

<sup>8</sup> Convention Watch, 2007, *Hak Azasi Perempuan untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 6.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Menurut Pasal 7 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) ini mengatur bahwa Negara-negara Pihak wajib melakukan semua langkah dan tindakan yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di bidang politik dan publik di negaranya.<sup>10</sup> *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women General Recommendation Number 23: Political and Public Life* mengatur bahwa Negara Pihak diwajibkan untuk mengambil segala langkah dan tindakan, mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di negaranya. Pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan keluarga pun akan terhambat karena adanya kesulitan pada perkembangan potensi perempuan dalam pengabdianya pada kemanusiaan dan negaranya.<sup>11</sup> Demi terwujudnya keterwakilan luas dalam kehidupan publik, perempuan harus mempunyai kesetaraan penuh dalam melaksanakan kekuatan politik dan ekonomi; perempuan harus dilibatkan secara penuh dan setara dalam pengambilan keputusan di semua tingkat, baik secara nasional maupun internasional, agar adanya kontribusi bagi pencapaian tujuan kesetaraan, pembangunan dan perdamaian. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila suatu negara mementingkan perspektif gender dan ingin mewujudkan demokrasi yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>11</sup> *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women General Recommendation Number 23: Political and Public Life*.

sesungguhnya di dalam negara tersebut, oleh karena itu pentingnya melibatkan perempuan dalam kehidupan publik untuk mengambil keuntungan dari kontribusi mereka serta untuk menjamin terpenuhinya penikmatan hak azasi manusia adalah bagi semua orang perempuan dan laki-laki. Partisipasi perempuan secara penuh bukan hanya untuk pemberdayaan melainkan juga bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan.<sup>12</sup>

Bangsa Indonesia terlihat belum menerapkan ketentuan dalam konvensi tersebut, terlihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara garis besar mengatur bahwa dalam kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus memenuhi angka 30% keterlibatan kaum perempuan di dalam kepengurusan tersebut<sup>13</sup>, serta dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa dalam pemilihan umum harus memenuhi angka 30% keikutsertaan kaum perempuan dalam pemilihan umum tersebut<sup>14</sup>.

Pasca berlakunya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender<sup>15</sup> Dalam Pembangunan Nasional, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharuskan menyusun suatu strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan pada level daerah. Pada perkembangannya Inpres tersebut

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>15</sup> Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantapan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah. Berdasarkan fakta yang diperoleh di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PUG yang meliputi: a) belum semua SKPD memiliki pemahaman tentang Gender, KKG maupun PUG; b) secara politik, meskipun undang-undang telah mengamanatkan 30% keterwakilan perempuan, akan tetapi fakta di lapangan hanya sekitar 15%-20%; c) terkait dengan kepemimpinan di Kalimantan Tengah yang paling berperan masih laki-laki; d) permasalahan dana yang belum responsif gender<sup>16</sup>.

Pembentukan Perda tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari proses pembangunan dengan tidak membedakan jenis kelamin. Pengarusutamaan gender ini berarti bahwa meningkatkan kehidupan yang semakin mausiawi, adil dan beradab, artinya PUG harus memiliki makna bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, meskipun tidak sama, walaupun terdapat perbedaan diantara keduanya, namun bukan menjadi suatu alasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat dibeda-bedakan.<sup>17</sup> Ruang lingkup perda ini terbatas pada

---

<sup>16</sup> Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

<sup>17</sup> Riant Nugroho., *op., cit.*, hlm. 300.



pengaturan seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah secara umum dalam kerangka Pengarusutamaan Gender. Perda ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah<sup>18</sup>.

Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 21/Kpts/KPU-Kota-020.435925/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Palangka Raya Untuk Setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 di Kota Palangka Raya memperlihatkan bahwa calon anggota DPRD kota Palangka Raya yang terdaftar meliputi 3 (tiga) daerah pilihan, yaitu Daerah Pilihan I mencakup Kecamatan Bukit Batu Dan Kecamatan Jekan Raya (Kelurahan Bukit Tunggal dan Petuk Katimpun), Daerah Pilihan II mencakup Kecamatan Jekan Raya (Kelurahan Menteng dan Kelurahan Palangka), dan Daerah Pilihan III Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Sabangau yang mendaftar adalah sebanyak 131 orang yang berjenis kelamin perempuan dari jumlah keseluruhan yang mendaftar<sup>19</sup>.

Penulis tertarik untuk meneliti mengenai penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan dibidang politik yang masih tergolong rendah.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 21/Kpts/KPU-Kota-020.435925/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Palangka Raya Untuk Setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 di Kota Palangka Raya.



Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini diangkat permasalahan: **Mengapa tingkat partisipasi wanita dalam bidang politik di Indonesia yang ditinjau dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (studi kasus di Kota Palangka Raya Periode 2014-2019) masih tergolong rendah?**

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan terhadap pelaksanaan hak partisipasi wanita dalam bidang politik di Kota Palangka Raya yang masih tergolong rendah, ditinjau dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum Hak Asasi Manusia khususnya dalam mengatur kebijakan tentang keikutsertaan kaum perempuan di bidang politik.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-undangan**

Agar dalam pembuatan suatu undang-undang, dapat lebih meningkatkan keaktifan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik di Indonesia.

##### **b. Bagi Kaum Perempuan**

Untuk menggerakkan hati dan minat kaum perempuan sehingga mau untuk ikutserta dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan nasional di Indonesia termasuk di bidang politik.

c. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat tidak lagi memiliki pandangan bahwa kedudukan kaum perempuan lebih rendah daripada kedudukan kaum laki-laki dan meningkatkan pandangan bahwa kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki kedudukan atau derajat yang sama.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul **“Implementasi Hak Partisipasi Wanita di Bidang Politik di Indonesia Yang Ditinjau Dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Studi Kasus di Kota Palangka Raya Periode 2014-2019) yang Masih Rendah”** merupakan karya hasil penulis, bukan merupakan hasil plagiasi dari skripsi yang sebelumnya sudah pernah ditulis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan hak partisipasi wanita di bidang politik di Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut yang membuat penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan hukum yang sudah ditulis sebelumnya. Adapun penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Evi Mulyasari Akmul, E12110252 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014, menulis

dengan judul penelitian **“Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo”**. Dengan mengajukan rumusan masalah yaitu sejauh manakah keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di kab. Wajo saat ini? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo?

Adapun hasil penulisan hukum dari penulis adalah sebagai berikut.

- a) Secara kuantitas, keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari data-data yang berasal dari hasil wawancara dengan berbagai informan. Perempuan yang menduduki jabatan sebagai kepala desa hanya ada 16 orang dari 118 desa di Kabupaten Wajo serta untuk anggota DPRD hanya ada 5 orang dari 35 anggota.
- b) Faktor-faktor yang menghambat keterlibatan perempuan antara lain yaitu, adanya budaya patriarki yang dapat mengikis kepercayaan diri dan keberanian bagi perempuan untuk ikut dalam bidang politik, kaum perempuan di Kabupaten Wajo memiliki tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi yang kurang, dan kaum perempuan yang memiliki keuangan yang memadai lebih memilih untuk berwirausaha ketimbang terjun dalam dunia politik.

2. Arista Aprilia, 1111045200005 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta pada tahun 2016, menulis dengan judul penelitian **“Hak Politik**

**Bagi Perempuan dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi**". Dalam hal ini penulis mengajukan rumusan masalah yaitu hak-hak politik apa saja yang diperbolehkan bagi perempuan dalam politik islam? Bagaimana pandangan Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengenai hak politik bagi perempuan?

Adapun hasil dari penulisan hukum penulis adalah sebagai berikut.

- a) Dalam Fiqh Siyasah, perempuan diberikan hak-haknya sebagai warga negara seperti pada umumnya, hanya saja ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam (khalifah) serta ada yang berpendapat bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif.
- b) Dalam fatwanya, Dr. Yusuf Al-Qadhwawi memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berkecimpung di dunia politik karena berpolitik merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh setiap manusia.

3. Nuni Silvana, E1A009022 dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2013, menulis dengan penelitian **"Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif"**. Dengan mengajukan rumusan masalah yaitu bagaimanakah penentuan kuota perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif? Apakah penentuan kuota bagi perempuan di kepengurusan partai politik dan pencalonan legislative sudah sesuai

dengan konvensi perempuan sebagaimana diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dalam upaya perjuangan hak perempuan?

Adapun hasil dari penelitian penulis adalah sebagai berikut.

- a) Keterwakilan perempuan dalam partai politik secara tegas telah dicantumkan sebesar 30%, baik di dalam pemerintahan pusat maupun di daerah, namun, jumlah perempuan yang memiliki kesempatan untuk duduk di kursi legislatif masih belum mencapai angka sebesar 30%.
- b) Ketentuan tentang kuota legislatif sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena undang-undang menginginkan agar dilakukannya afirmatif dalam memperjuangkan hak politik perempuan.

Berdasarkan ketiga penulisan skripsi yang telah dipaparkan adanya perbedaan yang menjadi pembeda dari penulisan tersebut, perbedaannya adalah sebagai berikut. Evi Mulyasari Akmul memaparkan dalam tulisan skripsinya bahwa secara kuantitati, keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo masih kurang serta adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat keterlibatan wanita, yaitu faktor kurangnya kepercayaan diri dari kaum wanita, faktor tingkat pendidikan dan organisasi yang rendah serta faktor keuangan. Arista Aprilia dalam penulisan skripsinya memaparkan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama sebagai seorang warga negara Indonesia

dan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qadhawi yang menyebutkan bahwa diperbolehkannya bagi kaum perempuan untuk berkecimpung dalam dunia politik. Nuni Silvana dalam penulisan skripsinya memaparkan bahwa keterwakilan perempuan di dunia politik sudah diatur secara tegas yaitu sebesar 30% baik dalam pemerintahan pusat maupun daerah, namun jumlah perempuan yang dapat menduduki kursi legislatif tersebut masih kurang dari 30%, serta tentang ketentuan kuota sebesar 30% tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena undang-undang menginginkan agar dilakukannya afirmatif dalam memperjuangkan hak politik perempuan.

Perbedaan ketiga penulisan skripsi tersebut dengan penulis adalah penulis dalam hal ini lebih menekankan adanya ketidaksetaraan yang terjadi akibat tidak adanya pemberian dorongan bagi kaum wanita untuk berpartisipasi sehingga tingkat partisipasi wanita dalam bidang politik di Indonesia yang ditinjau dari CEDAW masih tergolong rendah, serta dengan adanya pemberian batasan bagi kaum perempuan untuk melakukan keterlibatannya di bidang politik hanya sebesar 30% sedangkan kaum laki-laki diberikan kesempatan yang lebih banyak dari kaum perempuan yaitu sebesar 70% dengan melakukan studi kasus yang akan dilakukan di Kalimantan Tengah.

## F. Batasan Konsep

### 1. Implementasi

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>20</sup>

### 2. Partisipasi Politik

Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta.<sup>21</sup>

Politik sebagai pengetahuan adalah mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang system pemerintahan, dasar pemerintahan). Segala urusan dan tindakan kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.<sup>22</sup>

### 3. Diskriminasi

*The Universal Declaration of Human Rights* dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:

*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set in forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdiction, or international status of the countryterritory to which a person belongs, whether it be independent, terust, no-self governing or under any other limitation of sovereignty.*<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Hoetomo M.A, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya, hlm. 196.

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/partisipasi> diakses pada 6 Maret 2019 pada 02.33 WIB

<sup>22</sup> Hoetomo M.A., *op. cit.*, hlm. 389.

<sup>23</sup> *The Universal Declaration of Human Rights*.



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang fokus kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

### 2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri sebagai berikut.

a. Bahan hukum primer berupa hukum internasional dan hukum positif nasional.

- Bahan Hukum primer berupa hukum internasional yaitu:

1. *Statue of the International Court of Justice* Pasal 38 mengenai kompetensi pengadilan internasional dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan.

2. *The Universal Declaration of Human Rights*.

3. *International Covenant of Civil and Political Rights*

4. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

5. *Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

6. *Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women General Recommendation No. 23: Political and Public life.*

7. *General Comment No. 25: The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and The Right of Equal Access to Public Service (ART. 25)*

- Bahan hukum primer berupa hukum positif yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan kedudukan setiap warga negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant of Civil and Political Rights*).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pemabangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 21/Kpts/KPU-Kota-020.435925/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Palangka Raya Untuk Setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 di Kota Palangka Raya tahun 2014.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka berupa buku, doktrin, jurnal, hasil penelitian, internet, termasuk daftar anggota DPRD Kota Palangka Raya, dan wawancara yang dilakukan dengan Ida Ayu Nia Anggraini, S.Psi., M.AP sebagai narasumber serta situs resmi DPRD Kota Palangka Raya

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan dua acara, yaitu melalui Studi Kepustakaan dan Wawancara yang dilakukan dengan Ida Ayu Nia Anggraini, S.Psi., M.AP

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, doktrin, jurnal, hasil penelitian, dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber akan dilakukan dengan Ida Ayu Nia Anggraini, S.Psi., M.AP sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif atau dogmatik, yaitu dengan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- a. Deskripsi hukum positif yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, *Statute of the International Court of Justice*,

*The Universal Declaration of Human Rights, International Covenant of Civil and Political Rights, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women General Recommendation No. 23: Political and Public Life, General Comment No. 25: The Right to Participate to Public Affairs, Voting Rights and The Right of Equal Access to Public Service (ART. 25).*

b. Sistematisasi hukum positif dengan cara vertikal maupun horizontal.

- Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap manusia untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

- Secara horizontal tidak adanya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, yaitu dalam

Dalam Pasal 1 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang memberikan definisi secara rinci tentang diskriminasi terhadap kaum perempuan yang berbunyi sebagai berikut.

“Segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau

tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.<sup>24</sup>

*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), sedangkan Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dalam garis besar mengatur bahwa dalam kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus memenuhi angka 30% keterlibatan kaum perempuan di dalam kepengurusan tersebut, serta dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa dalam pemilihan umum harus memenuhi angka 30% keikutsertaan kaum perempuan dalam pemilihan umum tersebut.

---

<sup>24</sup> *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.*

- c. Analisis hukum positif dalam penulisan hukum ini menggunakan *open system* yang berarti perundang-undangan dapat dikaji, dievaluasi, diteliti secara terbuka.
- d. Interpretasi hukum positif menggunakan interpretasi yang menitik beratkan pada itikad baik dan tidak terpisah dari annex dan pembukannya, pembuatan perjanjian antar pihak menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak menimbulkan multitafsir kemudian perjanjian antara pihak tersebut dibuat menggunakan dua bahasa atau lebih.<sup>25</sup>
- e. Menilai hukum positif, dalam hal ini yang dinilai adalah peran pemerintah dalam penghapusan diskriminasi dan membuat suatu aturan hukum yang mengacu pada kesamaan pemberian hak bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki agar terciptanya kesamarataan keadilan yang diperoleh seluruh umat manusia dalam konsep hukum penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan di bidang politik dalam ruang lingkup HAM.

##### 5. Prosedur bernalar atau proses berpikir

Bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan tentang Pengesahan

---

<sup>25</sup> Tim Hukum Universitas Indonesia, “*Vienna Convention on the Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations*”, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 3 Nomor 1 Edisi oktober 2005, Tim Hukum Universitas Indonesia, hlm. 102.



Konvensi Penghapusan Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, *Statute of the International Court of Justice, The Universal Declaration of Human Rights, International Covenant of Civil and Political Rights, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women General Recommendation No. 23: Political and Public Life, General Comment No. 25: The Right to Participate to Public Affairs, Voting Rights and The Right of Equal Access to Public Service (ART. 25)*, dan yang khusus berupa kesimpulan dari hasil penelitian tentang Mengapa tingkat partisipasi wanita dalam bidang politik di Indonesia yang ditinjau dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (studi kasus di Kota Palangka Raya Periode 2014-2019) masih tergolong rendah.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan rencana isi penulisan hukum yang terdiri dari:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pemaparan tentang Partisipasi Kaum Perempuan di Bidang Politik, menguraikan tentang *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*, serta melihat Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik di Kota Palangka Raya yang ditinjau dari CEDAW dan disertai dengan analisisnya.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan Penelitian Hukum sebagai jawaban atas rumusan masalah.